

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
DI DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

OLEH :

**JELINA PURWASIH NADEAK
198520091**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
DI DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

**JELINA PURWASIH NADEAK
198520091**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 30/8/23


Access From (repository.uma.ac.id)30/8/23


LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
Nama : Jelina Purwasih Nadeak
NPM : 198520091
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Nina Angelia S.Sos., M.Si
Pembimbing I


Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.IPol
Pembimbing II


Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.IPol
Ka Prodi/WD I

Tanggal Lulus :

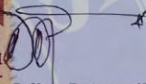
HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2023




Jelina Purwasih Nadeak
198520091



ABSTRAK

Kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Pemerintah dalam mengatasi hal ini mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Sei Suka Deras dalam menanggulangi kemiskinan dan faktor penghambat dalam menjalankan PKH dengan menggunakan teori implementasi menurut Charles O'Jones dengan 3 indikator yaitu organisasi, penafsiran dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Data diperoleh dengan melakukan proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sei Suka Deras belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Dalam organisasi, sumber daya manusia terungkap kurang memadai. Ditinjau dari penafsiran sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya ditinjau dari penerapan, tidak adanya jadwal program dalam melaksanakan PKH. Faktor penghambat dalam melaksanakan PKH ialah kurangnya sumberdaya manusia yang menyebabkan pendamping PKH kelebihan kapasitas jumlah KPM, tidak adanya sosialisasi menyeluruh mengenai program PKH dan adanya ketidakefektifan pada perubahan kebijakan baru sehingga agak memperlambat kinerja dalam pengolahan data karena adanya perantara keterbatasan waktu pengerjaannya.

Kata kunci: Implementasi, PKH, Kemiskinan

ABSTRACT

One of the policies of the Government of Indonesia for poverty alleviation is the Family Hope Program. This study aims to determine the extent of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sei Suka Deras Village using theory implementation according to Charles O'Jones. The research method is descriptive qualitative. Data obtained by interview and documentation. The results of the study show that the implementation PKH in Sei Suka Deras Village not optimal. The inhibiting factors were the lack of human resources which caused PKH human resources, there was no overall socialization of the PKH program and policy change.

Keywords: Implementation, PKH, Poverty



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sei Suka Deras Pada Tanggal 23 Juni 2000 dari Ayah Eron Nadeak dan Ibu Sulastri Sinaga. Penulis merupakan putri ketiga dari lima bersaudara.

Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Sei Suka dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis mengikuti Volunteer dalam Gerakan Mahasiswa Melek Sekitar pada tahun 2020, Penulis mengikuti magang Pejuang Muda Kemensos pada tahun 2021, Penulis juga menjadi komting mata kuliah Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah pada tahun ajaran 2022, Penulis juga merupakan mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2022, Penulis aktif dalam organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik sebagai Sekretaris Bidang Manajemen Keilmuan periode 2022-2023 dan organisasi eksternal yaitu Sahabat Nusantara periode 2022-2024.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat dan kasih karunia yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dimana dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”**.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Eson Nadeak dan Ibu Sulastri Sinaga selaku Orang tua penulis.
2. Maduma Nadeak, Darnita Nadeak, Eko Yosafat Nadeak dan Ayu Sri Lestari Nadeak selaku saudara – saudara kandung penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos,. M.Ipol selaku Kepala Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
6. Ibu Nina Angelia S.Sos,. M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

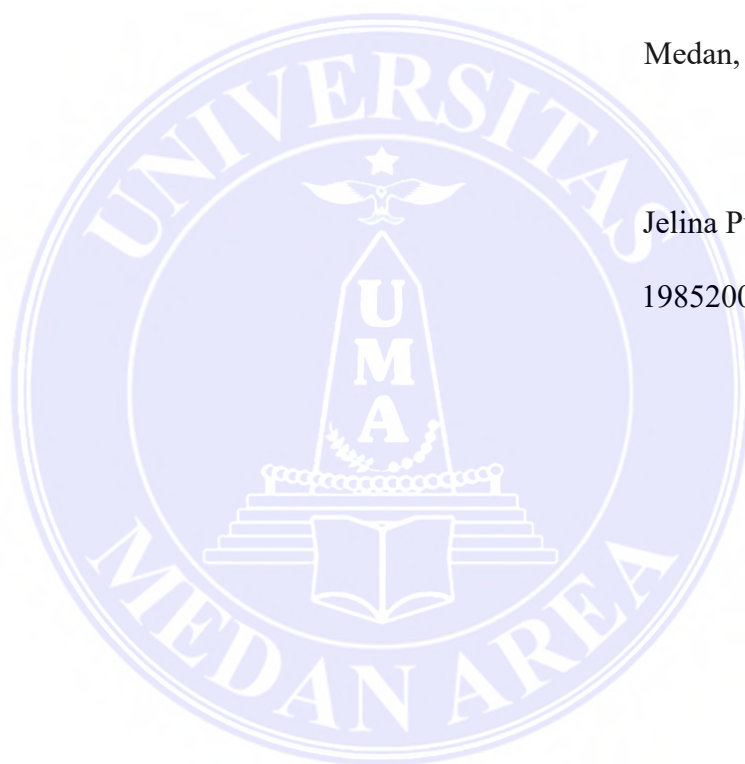
7. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos., M,IPol selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hikmawan Syahputra, S. IP., M.A selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi penulis.
9. Bapak Guntur Khayangan Sitompul, S.Sos., M.IP selaku dosen pengampu penulis di Semester 6 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan proposal skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
11. Bapak Koordinator PKH Batu Bara, Pendamping PKH Sei Suka Deras dan seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian.
12. Johanes Audes Sinaga yang telah menjadi rumah kedua bagi saya dalam melewati kehidupan di perantauan serta selalu *act of service* dan *gift receiving* kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
13. Tripani Desintia Sinurat sahabat penulis sejak kecil yang memberi motivasi dan dukungan serta menemani penulis dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi.
14. Harrys Simon Nababan selaku teman penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi.
15. Teman-teman stambuk 2019 yang selalu memberi semangat dan dukungan.
16. Terakhir tapi tidak kalah penting untuk diri saya sendiri yang selalu mau terus berusaha dan bertahan dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan skripsi hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat positif untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat baik untuk pendidikan ataupun masyarakat, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Medan, Juli 2023

Jelina Purwasih Nadeak

198520091



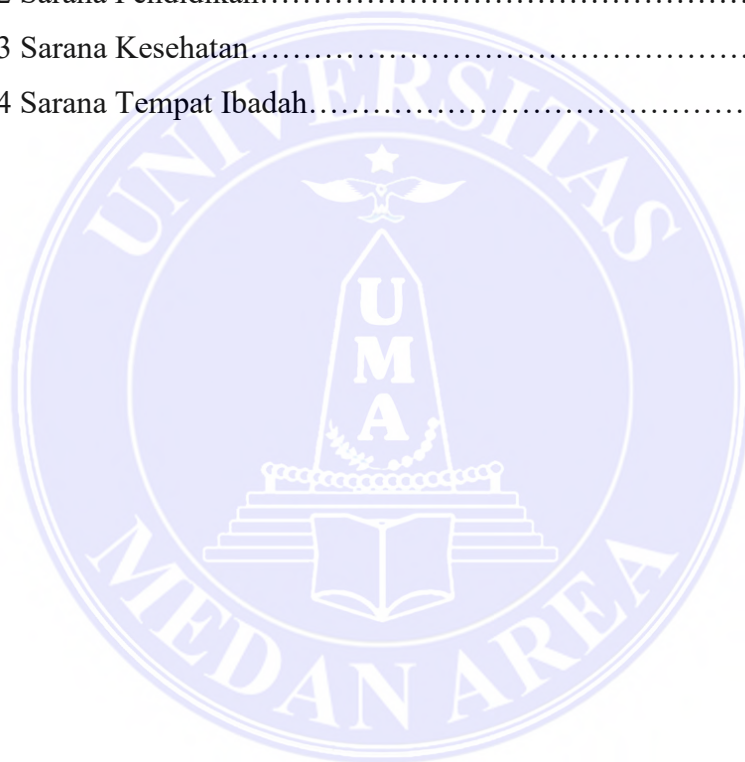
DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Implementasi	8
2.2. Kebijakan.....	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	14
2.3 Kemiskinan.....	16
2.3.1 Faktor-Faktor Kemiskinan	17
2.3.2 Bentuk-bentuk Kemiskinan.....	18
2.4 Program Keluarga Harapan	16
2.4.1 Hak dan Kewajiban KPM PKH.....	21
2.4.2 Tujuan PKH.....	22
2.4.3 Kriteria Penerima PKH	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian	33

3.3 Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sei Suka Deras.....	39
4.1.2 Penduduk Desa Sei Suka Deras	42
4.1.3 Kondisi Lingkungan Desa Sei Suka Deras	42
4.1.4 Sarana dan Prasarana.....	43
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan.....	47
1. Organisasi.....	48
2. Penafsiran.....	59
3. Penerapan	66
4.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	71
1. Kurangnya Sosialisasi.....	71
2. Perubahan Kebijakan	72
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2020 – 2021 di Sumatera Utara.....	1
Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sei Suka Deras	4
Tabel 2.1 Kriteria Penerima PKH.....	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan.....	44
Tabel 4.3 Sarana Kesehatan.....	45
Tabel 4.4 Sarana Tempat Ibadah.....	45



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan.....	15
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	27
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Sei Suka Deras	40
Bagan 4.2 Struktur Organisasi PKH Kabupaten Batu Bara	49



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Pedoman Wawancara.....	83
2. Lampiran Dokumentasi Wawancara.....	85
3. Lampiran Biodata Informan.....	87
4. Lampiran Perlengkapan atau alat-alat kerja.....	89
5. Lampiran Sarana Pendidikan.....	91
6. Lampiran Sarana Tempat Ibadah	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja (Larasati Prayoga et al, 2021).

Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin yaitu dari 8,49 persen pada September 2021 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 4,88 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Berikut perkembangan kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun 2020 – 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2020 – 2022 di Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000) (Jiwa)
1	2020	1 283,29
2	2021	1 343,86
3	2022	1 268,19

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, 2022

Pemerintah dalam mengatasi hal ini mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta memupuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Kebijakan tersebut ialah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (KIP), dan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Peraturan presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007 untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellent* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial nasional.

Program bantuan perlindungan sosial ini sudah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara di dunia ini seperti Amerika, India, dan China. Program bantuan bersyarat dari pemerintah pusat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Namun sebagai anggota peserta Program Keluarga Harapan, Rumah Tangga Sangat

Miskin tersebut harus mampu memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup Rumah Tangga Sangat Miskin dan mampu mengentaskan rumah tangga tersebut dari rantai kemiskinan terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan (Yuli Tusiono, 2017).

Dalam Manadopost.id tertulis bahwa Program Keluarga Harapan selalu menyeruput beberapa masalah utama yaitu tentang mengkritisi efektifitas PKH. Banyak orang bertanya miring contohnya, mengapa ada tua renta tidak menerima tapi ada muda belia mendapatkan dana PKH. Disinilah kurangnya informasi dan transparansi terkait apa dan bagaimana PKH dan siapa saja penerima manfaat PKH. Transparansi itu penting dilakukan oleh pelaksana PKH di kab/kota yaitu Dinas Sosial, aparat kecamatan dan kelurahan/desa, dan Pendamping PKH. (diakses pada 15 november 2022)

Desi Pratiwi (2020) dalam penelitiannya yang telah dilakukan, beliau menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I dimulai sejak tahun 2014 munculnya Program Keluarga Harapan adalah untuk pengentasan kemiskinan. Namun, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I dikatakan belum efektif, hal tersebut dikarenakan sebagian peserta PKH merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya dikategorikan menengah ke atas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dheby (2017) menyatakan bahwa bagi masyarakat miskin pelayanan kesehatan yang belum memuaskan dan mahalnya biaya pendidikan dirasa sangat menyulitkan mereka. Masalah ini bisa diatasi melalui pelaksanaan PKH. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan PKH mampu memberikan kontribusi yang serius dalam membantu keluarga miskin karena menekankan langsung pada subjeknya.

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, dapat kita simpulkan bahwa adanya bantuan Program Keluarga Harapan sangatlah membantu keluarga miskin atau masyarakat yang kesulitan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Adanya Program Keluarga Harapan yang baik akan memberikan dampak positif besar bagi kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menanggapi masalah kemiskinan dengan mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Sei Suka Deras

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH
1	2020	68 Kartu Keluarga
2	2021	77 Kartu Keluarga
3	2022	110 Kartu Keluarga

Sumber : Data sp2d 2022 (Surat perintah pencairan dana)

Tabel jumlah penerima bantuan PKH diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Desa Sei Suka Deras tiap tahun meningkat. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan ialah 68 kartu keluarga, tahun 2021 meningkat sebanyak 9 KK sehingga ada 77 KK yang menerima bantuan PKH dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan penerima bantuan sebanyak 23 KK sehingga penerima bantuan sosial atau PKH pada tahun 2022 di Desa Sei Suka Deras berjumlah 110 KK.

Pra penelitian atau observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa adanya pemberian bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi faktor yang paling sering terjadi didalam masyarakat. Secara

nyata permasalahan data Peserta PKH di lapangan dari hasil verifikasi keluarga sangat miskin (KSM) oleh pendamping masih dijumpai adanya Peserta PKH yang tidak memenuhi syarat, sementara di sisi yang lain ada beberapa masyarakat yang memenuhi syarat sebagai peserta PKH namun justru tidak masuk di data penerima PKH tersebut.

Banyak masyarakat mengeluh kenapa hal itu terulang tiap tahun ke tahun dikarenakan merasa pantas mendapat bantuan dan tercantum dalam DTKS namun tidak tercantum. Disisi lain, Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak terpenuhi dengan baik seperti mendapatkan sosialisasi atau pertemuan tiap bulan antar keluarga penerima manfaat PKH dengan pendamping PKH. Selanjutnya banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa PKH merupakan bantuan sosial yang bersyarat dan memiliki tiga kategori.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas adalah;

1. Bagaimana implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?

2. Apa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan (implementasi) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-informan yang lebih baik dari sebelumnya.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat dan sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,

sistematis, dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan dilapangan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Menurut Widodo (Syahida, 2014) implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Hal ini berhubungan dengan suatu perencanaan, persetujuan atau kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Riple dan Franklin (Budi Winarno, 2014) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor penyebab yang mempengaruhi suatu program. Ripley dan Franklin menjelaskan ada 5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini, yaitu :

- a. Banyaknya aktor yang terlibat
Dalam tindakan implementasi mengundang banyak aktor dengan kata lain, semakin lengkap suatu program yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin banyak aktor yang tersangkut.
- b. Kejelasan tujuan
Kesesuaian dan konsistensi maksud dapat mengerti sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami. Jika isi kebijakan itu tidak jelas maka implementor tidak akan bisa memahami bahkan juga akan sulit diimplementasikan.
- c. Kompleksitas program pemerintahan
Kerumitan program bisa diamati dari rancunya aturan program yang bersangkutan, artinya petunjuk realisasi yang dibuat akan

- mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya program yang diimplementasikan.
- d. Partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah
Maksud dari pengikutsertaan pada seluruh pihak pemerintahan adalah turut berperan dari seluruh aktor yang tersangkut dalam implementasi program.
 - e. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
Faktor yang tidak dicapai ini adalah apakah ada faktor-faktor di luar teknis atau bisa disebut yang telah melebihi wilayah pengawasan yang menurut implementor yang secara tidak langsung bersangkutan dengan pengimplementasian program, sehingga dapat menghambat atau menggagalkan implementasi program yang sudah disusun sebelumnya.

Charles O. Jones (Tahir, 2014) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Dalam (Sri Maryuni, 2016) pandangan Charles O. Jones ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Organisasi
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b. Interpretasi
Mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- c. Penerapan
Peraturan atau kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang di inginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014) Implementasi kebijakan adalah tindakan yang

dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel tersebut yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012) identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Dalam melaksanakan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus teridentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dapat dipertimbangkan.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Aan, 2017). Ketersediaan sumber daya dalam implementasi sistem manajemen keselamatan sangatlah penting. Sumber daya yang dibutuhkan diantaranya yaitu mengenai pengorganisasian untuk menetapkan atau pendelegasian wewenang atau tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum serta peningkatan kompetensi yang membutuhkan sumber daya khususnya sumber daya manusia. Kebijakan Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum mengharuskan setiap perusahaan angkutan umum mempunyai fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor sehingga diperlukannya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Permenhub no.85 tahun 2018).

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka tidak terlepas dari struktur birokrasi dan biasanya dikaitkan dengan norma- 23 norma dan pola –pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badanbadan

- eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata, dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan tersebut.
- d. Komunikasi antar organisasi
Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012) berpendapat bahwa implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuantujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Oleh karena itu prospekprospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan dasar tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan serta konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
 - e. Disposisi atau sikap para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Aan Widiatusti 2017).
 - f. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012) sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Apakah kebijakan atau program tersebut mendapat dukungan baik dari segi ekonomi, isu baik yang mendukung atau menolak kebijakan, ataupun sikap dari para elit baik pihak pemerintah maupun swasta dan tentu saja kelompok-kelompok kepentingan dalam menanggapi kebijakan yang diambil pemerintah. Semua itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan tujuan suatu kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Tindakan yang dimaksud merupakan usaha untuk mengubah sebuah keputusan menjadi tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu baik itu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha dalam pencapaian perubahan besar ataupun perubahan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap Implementasi menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu diimplementasikan. Tanpa implementasi maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit seperti yang dikemukakan oleh Udoji (Agustino, 2017) bahwa tanpa pelaksanaan, kebijakan ini hanyalah catatan elit. Suatu kebijakan, jika tidak diimplementasikan hanyalah mimpi atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip.

Sejalan dengan pendapat Udoji, George Edward III (Winarno, 2014) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentuk program dan dampak kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Program yang diimplementasikan dengan baik akan gagal jika gagal menyelesaikan masalah tujuan kebijakan secara memuaskan atau jika gagal mengurangi masalah tujuan kebijakan, program juga bisa gagal. Tugas implementasi menurut Grindle dalam (Handoyo, 2012) menciptakan mata rantai yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, kegiatan terkait kebijakan pemerintah perlu

mengartikulasikan dan mendukung tujuan, jika tidak ini menunjukkan ada kesalahan analisis kebijakan.

George Edward III (Agustino, 2012) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain, yaitu:

- a. Komunikasi
Merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan supaya pelaksana mengetahui maksud tugas yang harus dilaksanakan, artinya yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya
Apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk merealisasikan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut biasanya berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi
Watak dan kepribadian yang dimiliki oleh pelaksana, misalnya komitmen, jujur, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut bisa melaksanakan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika implementor memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak berjalan dengan baik.
- d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksana kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah "*Standard Operating Procedure (SOP)*" dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari beberapa defenisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

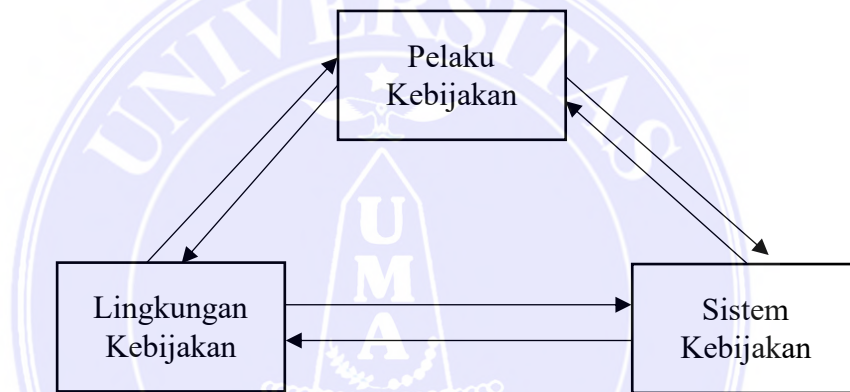
Kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu ; kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik (*publik policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Abdul Wahab, 2014) mendefinisikan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Ini penting bagi masyarakat karena pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Pemerintah harus bertindak secara bijaksana dan menghindari kebijakan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Suatu Kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Untuk memahami suatu kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan makan perlu merinci penjelasan - penjelasan tentang implementasi dalam komponen - komponen utama (Indra Muda, 2019).

Bagan 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : Buku Analisis Kebijakan Publik, 2023

Masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

Sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak

terpisahkan di dalam praktiknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, tidak berbeda dari aktor-aktor kebijakan lainnya, mereka merupakan pencipta dan hasil ciptaan sistem kebijakan.

2.3 Kemiskinan

Undang-Undang No.4 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada sejak manusia itu ada. Kemiskinan memiliki banyak segi dan akan selalu menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan adanya perbedaan pada tingkat upah, serta adanya perbedaan dalam pemenuhan modal, sehingga kemiskinan dapat digambarkan pada teori lingkaran kemiskinan (Imelia, 2012). Konsep ini cukup luas cakupannya dan beragam sehingga seringkali kurang terukur, termasuk Indonesia, seringkali gagal mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan dan gizi. Beban kemiskinan dirasakan oleh kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak, akibatnya masa depan mereka terancam. Pada dasarnya terdapat dua sisi kemiskinan, yaitu kemiskinan yang

dilihat dari tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok (dasar minimum) untuk seseorang dapat hidup dengan layak (kemiskinan absolut) dan kemiskinan yang terjadi karena adanya ketimpangan sosial dimana seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi masih dibawah kondisi masyarakat sekitarnya (kemiskinan relatif) (Windra et al., 2016).

2.3.1 Faktor – Faktor Kemiskinan

Kartasasmita menyatakan dalam (RatnaSari & Firdayetti, 2019) keadaan kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan pengembangan diri dan menyebabkan terbatasnya memanfaatkan peluang dalam mendapatkan dunia pekerjaan.
2. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah, menyebabkan stamina fisik, kemampuan berpikir dan inisiatif yang rendah.
3. Keterbatasan lapangan pekerjaan, selain dari kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, kemiskinan juga diperburuk oleh terbatasnya kesempatan kerja. Selama masih ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, dan masih ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
4. Kondisi terisolasi banyak masyarakat miskin yang tidak berdaya secara ekonomi karena terisolasi dan terpencil. Karena tinggal di daerah terpencil sehingga sulit atau tidak terjangkau bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan kemajuan lainnya.

2.3.2 Bentuk - Bentuk Kemiskinan

Aspek kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers menggambarkan sifat masalah kemiskinan dan faktor – faktor yang menimbulkan kondisi yang dikenal dengan istilah kemiskinan. Ada empat bentuk kemiskinan, di mulai dari keadaan kemiskinan yang di pandang sebagai salah satu bentuk masalah yang multidimensional.

Berikut empat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Ali Khomsan..et.al, 2015), sebagai berikut ;

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, oleh karena itu, memenuhi standar pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai pengeluaran atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling sering digunakan sebagai konsep untuk mendefinisikan atau menentukan kriteria dimana seseorang atau kelompok dianggap miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari dampak kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan atau standar kesejahteraan.

Daerah yang belum terjangkau program pembangunan tersebut biasa disebut sebagai daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang muncul sebagai akibat dari sikap kebiasaan individu atau masyarakat umumnya, berkaitan dengan budaya dan praktik yang relatif tidak bersedia untuk meningkatkan standar hidup melalui proses modern.

Kebiasaan tersebut dapat mengubah sikap menjadi lebih hemat, tidak pernah kreatif dan relatif bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya akses terhadap sumberdaya, biasanya terjadi dalam tatanan sosial budaya atau sosial politik yang tidak mendukung pembebasan dari kemiskinan, dan terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.4 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Program ini pertama kali muncul pada tahun 2007. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok secara rutin satu bulan sekali (Pedoman PKH, 2017).

Landasan Hukum pemberian Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.

3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa ;

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.

2.4.1 Hak dan Kewajiban KPM PKH

Bantuan PKH diberikan kepada ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah dan penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban dari penerima program ini, warga berhak menerima bantuan uang tunai, menerima pelayanan kesehatan (ibu

hamil dan bayi) di layanan kesehatan dan menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar sesuai ketentuan yang berlaku dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Kewajiban dari penerima program ini adalah peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah serta untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. (Kemensos RI, 2022).

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan dan tujuan utama dari Program Keluarga Harapan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan hidup terutama kelompok masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum Program Keluarga Harapan yaitu untuk memutus rantai kemiskinan dan menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku dan pola pikir rumah tangga sangat miskin agar mengalami peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun secara tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan (Deddy Utomo, 2016) terdiri atas:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. Meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, terkhusus bagi RTSM.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2 berisi mengenai tujuan Program Keluarga Harapan yaitu :

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- e. untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal pada Keluarga Penerima Manfaat.

Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi

anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan merawat ibu hamil, balita dan meningkatkan nutrisi mereka, kemudian mengantarkan anak-anak ke bangku pendidikan, diharapkan akan berdampak angka panjang terhadap pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014).

2.4.3 Kriteria Penerima PKH

Penerima Program Keluarga Harapan dapat dibedakan komponen, yaitu komponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.1 Kriteria Penerima PKH

No	Komponen	Kriteria
1	Kesehatan	Ibu hamil/nifas/menyusui Anak Usia Dini
2	Pendidikan	Anak Usia Sekolah
3	Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Penyandang Disabilitas berat

Sumber : *pkhjepara.com*

Tabel diatas setiap komponen memiliki kriteria yang berbeda-beda. Adapun penjelasan kriteria setiap komponen dengan rincian ialah sebagai berikut :

1. Komponen kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut ;

- a. Ibu hamil/menyusui/nifas.

hamil/menyusui/nifas adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Anak berusia 0 – 6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum sekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan adalah sebagai berikut;

- a. Anak sekolah dasar atau sederajat.
- b. Anak sekolah menengah pertama atau sederajat.
- c. Anak sekolah menengah atas atau sederajat.
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut;

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedistabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak

mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Dilansir dari laman kemensos, bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut (merdeka.com).

a. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

1. Reguler : Rp. 550.000,-/ keluarga / tahun
2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,-/ keluarga / tahun.

b. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

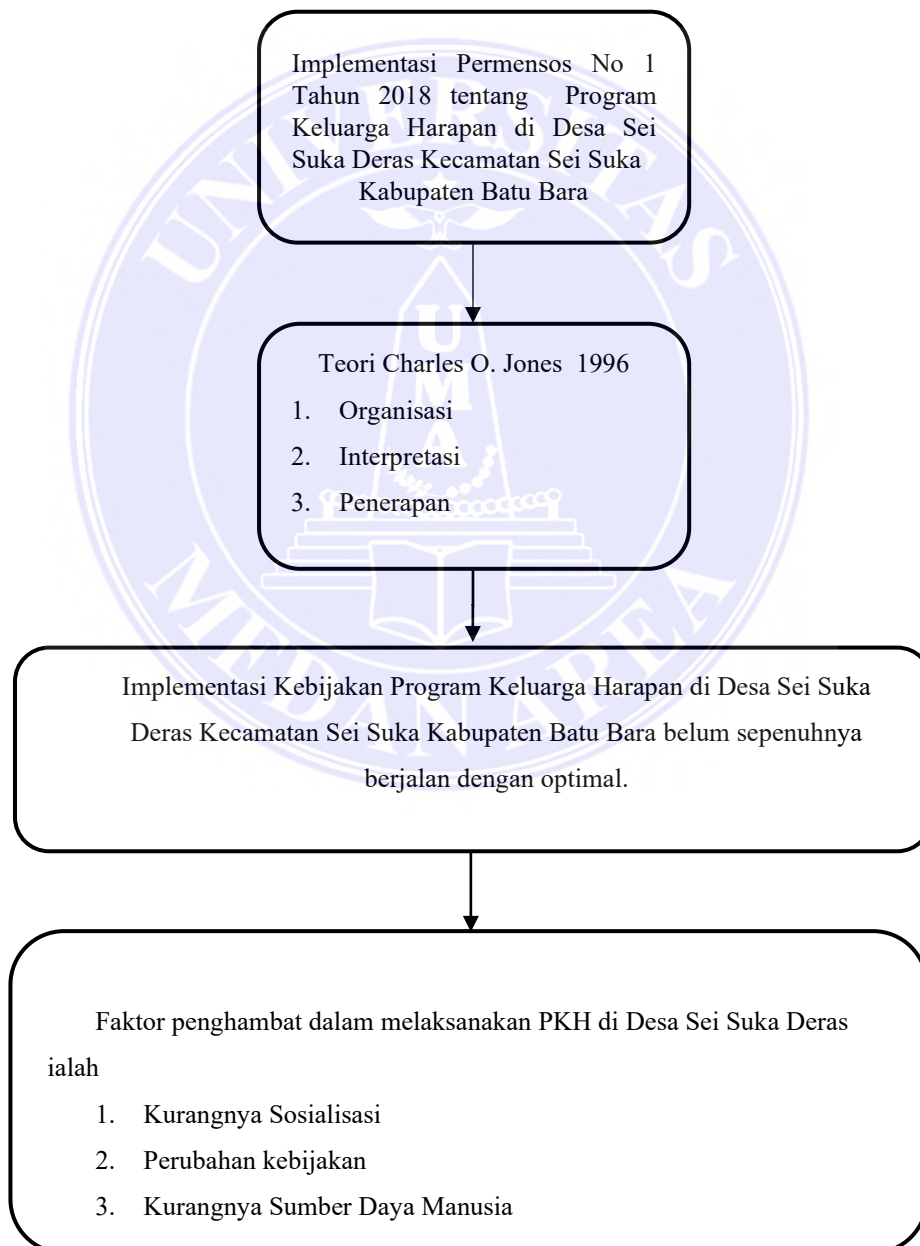
1. Ibu hamil sebesar Rp 2.400.000 /tahun.
2. Anak usia dini sebesar Rp 2.400.000/tahun.
3. Anak usia sekolah sekolah dasar (SD) sebesar Rp 900.000 /tahun.
4. Anak usia sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp 1.500.000/tahun.
5. Anak usia sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 2.000.000/tahun.
6. Lanjut usia atau lansia sebesar Rp 2.400.000/tahun.
7. Penyandang disabilitas sebesar Rp 2.400.000/tahun.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Syamsul Arifin dalam (Simanjuntak, 2017) adalah suatu model konseptual tentang teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dengan adanya kerangka

berpikir akan mempermudah dalam memahami isi dari suatu penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini kerangka berpikir/kerangka pemikiran dapat memberikan manfaat sebagai dasar rumusan hipotesis dan dalam kerangka berpikir menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok sub variabel pokok/ pokok masalah yang ada dalam penelitian.

BAGAN 2.2
KERANGKA BERPIKIR



Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan didukung oleh Peraturan Menteri No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dimana Program Keluarga Harapan ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones 1996 (Tahir, 2014) yang menyatakan bahwa ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Organisasi
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b. Interpretasi
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
- c. Penerapan
Untuk dapat melihat penerapan harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Hasil atau output dalam penelitian ini ialah implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dan Faktor penghambat dalam melaksanakan PKH di Desa Sei Suka Deras ialah Kurangnya sumberdaya manusia, Kurangnya pemahaman warga terhadap PKH dan Perubahan kebijakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber yang pernah ada dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembanding. Menurut Randi (2018) penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian

terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan	Jenis Penelitian
1	Waruwu, Jonly Krisman. 2019. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias.	uji hipotesis t-statistik bahwa adapengaruh PKH dengan nilai t hitung > t Tabel (5,608 > 1.997) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil perhitungan statistik nilai R-Square sebesar 0,282 atau 28,2% pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan sebesar 28,2% sedangkan sisanya 71,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.	Jurnal
2	Walfajrin, 2018. Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang	Kesejahteraan rumah tangga miskin sangat dipengaruhi oleh program keluarga harapan sebesar 39,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.	Skripsi
3	Rahmah, 2021. Pelaksanaan PKH oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Pelaksanaan PKH oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah Anak Putus Sekolah belum berjalan dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan PKH tetapi malah tidak menerimanya.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan jenis hukum sosiologis sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Skripsi

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan	Jenis Penelitian
4	Trinanda, Riska, 2021. Pemanfaatan dana bantuan pendidikan PKH dalam upaya pemberdayaankeluarga penerima manfaat di kelurahan lebong gajah kota Palembang.	Program Keluarga Harapan (PKH) 75-100% sesuai dengan kriteria Keluarga Penerima Manfaat artinya PKH tepat sasaran, Pemanfaatan dana pendidikan 82% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memanfaatkan untuk membeli kebutuhan pendidikan anak, dan 80-100% pemberdayaan keluarga dalam KPM tersebut ialah kunci utamanya terletak pada Pendamping PKH yang mendampingi KPM yang sering disebut dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan arahan bagaimana terhadap pendidikan anak, mensukseskan pendidikan anak, mengatur keuangan, dan lain-lain.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif	Skripsi
5	La Ode Muhammad Elwan, 2018. Implementasi PKH Di Kecamatan Binongko Kabupaten Warkatobi.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Binongko Wakatobi banyak mengalami kendala dan belum terlaksana dengan baik. Sosialisasi belum menyeluruh sehingga kurang mendapat dukungan dari pihakpihak terkait.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sedangkan penulis menggunakan teori Charles O Jones	Jurnal

Sumber : diolah peneliti, 2022

Secara umum yang membedakan penelitian dari peneliti yang sekarang dan peneliti terdahulu ialah bahwa peneliti yang sekarang berfokus pada ketiga komponen program keluarga harapan, sedangkan sebagian dari peneliti terdahulu ada yang berfokus pada komponen pendidikan saja. Kemudian jumlah informan yang berbeda, penggunaan teori yang berbeda, lokus yang berbeda-beda dan uga hasil penelitian yang beragam.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata – kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015).

Creswell 1998 (Haris Herdiansyah, 2011:8) menyatakan bahwa:

“penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dalam menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti”

Dalam penelitian, penulis berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dari Program Keluarga Harapan melalui informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini yang bersumber dari masyarakat anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, penelitian kualitatif menyimpulkan data dalam setting ilmiah dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi analisis data induktif atau kualitatif, pentingnya generalisasi untuk hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Dengan alasan memilih lokasi tersebut karena adanya ketertarikan akan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara serta ingin mengetahui sejauh mana implementasi program keluarga harapan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Rentang waktu yang akan digunakan dalam proses penelitian ini berkisar dua bulan, Desember 2022 – Januari 2023.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan - Feb	Mar	Mei – Juni	Juli
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Perbaikan Proposal							
4	Pengambilan Data Penelitian							
5	Penyusunan Skripsi							
6	Seminar Hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang Meja Hijau							

Sumber : diolah peneliti, 2023

3.3 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber dari penelitian ini merupakan dari hasil wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber. Dalam penelitian ini mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kunci	Bpk Mukhrizal Arif, M.Pd.I Ibu Hanni Rahma Sari, SH
2	Utama	Ibu Sri Rahayu, Ibu Delima Simanjuntak dan Ibu Nurmansyah Putra
3	Tambahan	Ibu Maya Ismiyati

Sumber : diolah peneliti, 2022

Berikut penjelasan mengenai tabel informan penelitian diatas, ialah sebagai berikut;

a. Informan kunci

Informan kunci ialah orang-orang yang mengetahui serta memahami tentang informasi penting dalam hal permasalahan serta objek yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Bapak Mukhrizal Arif, M.Pd.I selaku Koordinator PKH Kabupaten Batu bara dan Ibu Hanni Rahma Sari, SH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

b. Informan utama

Informan utama merupakan orang-orang yang ikut serta dan mengalami secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun Informan utama dalam penelitian ini ialah ibu Sri Rahayu, Nurmansyah Putra dan Ibu Delima Simanjuntak yang merupakan keluarga penerima manfaat bantuan program keluarga harapan di lokasi penelitian.

c. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan orang-orang yang benar-benar memberikan informasi maupun data meskipun mereka tidak ikut serta secara langsung dalam hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan ialah ibu Maya Ismiyati selaku Kaur Kesejahteraan Desa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder yang digunakan peneliti ialah beberapa buku, jurnal dan sumber internet lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data (Riduwan, 2012). Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai. Tanpa mengetahui strategi dalam mengumpulkan informasi, analisis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi ukuran informasi yang ditetapkan. Untuk mendorong mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi dapat dikatakan melakukan pengamatan dan survey secara langsung ke lokasi penelitian dalam rangka mendapatkan informasi dari suatu yang akan diteliti. Sama seperti yang dikemukakan oleh Menurut Nasution (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti terlebih dahulu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
2. Wawancara
Untuk penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan akurat untuk pengumpulan data wawancara tidak terstruktur akan dilakukan secara detail hingga memperoleh keterangan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Pasolong (Pasolong, 2013) “wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”. Namun demikian wawancara juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada seperti telepon dan internet. Beberapa pertanyaan diajukan kepada berbagai pihak penting dan berkompeten dalam isu-isu dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang tepat serta akurat. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan yang berhubungan pengalaman informan, tanggapan informan, pengetahuan informan dan latar belakang informan yang memberikan informasi terkait dengan hal yang ingin diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2013).
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan mencari informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan oleh sipeneliti yang terdiri dari catatan-catatan penting, transkrip, buku, dan lainnya. Dokumentasi ini menjadi bukti resmi yang harus dipertanggungjawabkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara efisien, dengan mengatur informasi ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpenting menjabarkan, mengaturnya ke dalam desain, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

1. Reduksi Data.

Sugiyono (2018) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami Sugiyono (2018).

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Sei Suka Deras belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Dilihat dalam organisasi, sumber daya manusia terungkap kurang memadai. Selanjutnya dilihat dari penerapan atau aplikasi, pelaksanaan PKH tidak memiliki jadwal program yang pasti karena adanya perubahan kebijakan dari pusat.

Faktor penghambat dalam melaksanakan PKH di Desa Sei Suka Deras ialah kurangnya sumberdaya manusia yang menyebabkan pendamping PKH kelebihan kapasitas jumlah KPM, minimnya sumberdaya fasilitas pelayanan kesehatan sehingga para KPM tidak dapat hak sepenuhnya, tidak adanya sosialisasi menyeluruh mengenai program PKH dan adanya ketidakefektifan pada perubahan kebijakan baru sehingga agak memperlambat kinerja dalam pengolahan data karena adanya perantara keterbatasan waktu pengerjaannya.

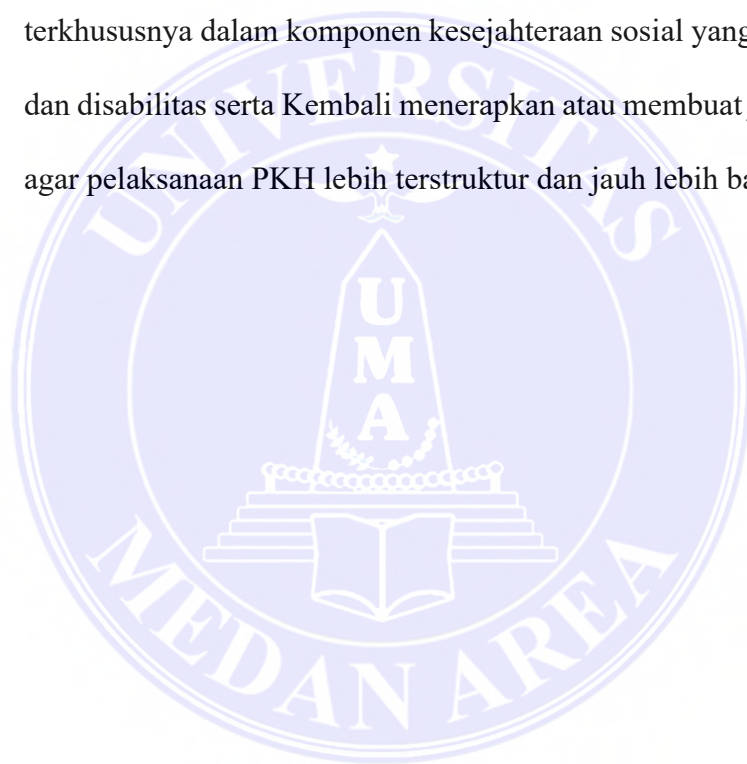
5.2 Saran

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan program keluarga harapan di Desa Sei Suka Deras Kabupaten Batu Bara, peneliti sedikit memberikan beberapa masukan atau saran. Adapun beberapa saran atau masukan tersebut ialah;

1. Tim pelaksana PKH di Desa Sei Suka Deras mengadakan sosialisasi Program PKH tidak hanya kepada peserta atau KPM PKH, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti kepala dusun, dan warga setempat atau

masyarakat luas, sehingga tidak ada kesalahpahaman mengenai program PKH dan mendapat dukungan masyarakat secara massif serta Mengusulkan perekrutan sumber daya manusia kembali ke pusat agar pendamping PKH fokus pada 1 desa saja dan tidak kelebihan kapasitas agar monitoring dalam dilakukan setiap bulan.

2. Penambahan petugas kesehatan agar dapat berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak para penerima manfaat terkhususnya dalam komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lansia dan disabilitas serta Kembali menerapkan atau membuat jadwal program agar pelaksanaan PKH lebih terstruktur dan jauh lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus M.Hardjana, (2016). *Ilmu Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali Khomsan.[et.al]. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Anggara, Sahya. (2014). *“Kebijakan Publik”* Bandung : CV Pustaka Setia
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan.(2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Trail (Penerbit Trail).
- Arini T. Soemohadiwidjojo. (2014) *“Mudah Meyusun SOP (Standard Operating Procedure)”*, Penebar Plus.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010). *Efektifitas Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka
- Buku Panduan Pedoman Program Keluarga Harapan, 2017*
- Buku Panduan Pedoman Program Keluarga Harapan, 2021*
- Brook, Robert H. (2015). *Redefining Health Care System*. Santa Monica, California; The Rand Corporation
- Dr. Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta : Rajawali Pers
- Edy, Sutrisno, (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya. Semarang
- Harbani, Pasalong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Hj.Rulinawaty Kasmad, S.sos, M.Si. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*
- Joan Hesti Gita Purwasih, Dkk. (2018). *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*. Klaten: Cempaka Putih.

- Muda, Indra dan Beby Masitho Batubara. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan. Media Persada.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (eds.))*. Bandung: ALVABETA cv.
- Purwanto (2013). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Randi.(2018).*Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga
- Riduwan. (2012). *Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta; Salemba Empat.
- Syafruddin. (2011). *Ilmu Kepeatihan Olahraga Teori dan Aplikasinya Dalam Pembinaan Latihan*. Padang: UNP Press Padang
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (R&D)*. Bandung: IKAPI
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV.Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran. Pemerintah Daerah*. Alfa Beta. Bandung
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran. Pemerintah Daerah*. Bandung; Alfa Beta.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.. (2013). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Togiaratua Nainggolan, dkk. *Program Keluarga Harapan di Indonesia. (2012). Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi* . P3KS Press (Anggota IKAPI)
- Warul Wlidin, and Saifullah Idris, 2006047203 and Tabrani,. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press, Banda Aceh. ISBN 978-602-18962-8-0
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua)*. Yogyakarta: Center og Academic Publishing Service,CAPS

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *Journal Of Public Sector Innovation*. Vol. 3, No. 2, Mei Tahun (68 - 74).

Ekardo, A., Firdaus, F. & Elfemi, N. 2014. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamanga*. 3(1), 1-9

Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol.19 No.3

Haedar Akib. 2010. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn.

Imelia, I. 2012. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. (April).

Hardinandar, F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi kasus 29 kota/kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 4(1. 1-12.

Junine, V.M., Kaunang, M., and Ismail Rachman. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Manado (Suatu Studi Di Kecamatan Tuminting). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 3 No. 3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Larasati Prayoga, M., Muchtolifah, & Sishadiyati. 2021. Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education journal*, 3 (2), 135.

Najidah, Nurul, and Hesti Lestari. 2019. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Jurnal Kajian Kebijakan Publik Dan Manajemen* 8.2

Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. 2021. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Jurnal Syntax Idea*, 4(1), 6.

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal Of Public Sector Innovations)*, 3(2) 68-74.

- Saragih, S., Batoebara, M.U., and Nur Ambia Arma. 2021. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, Vol.3 No.1
- Susanto, Rudy; Pangesti, Cantik. 2021. Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi ssTerhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal Of Applied Business And Economic)*
- Tusiono, Yuli. 2017. Partisipasi Publik dalam Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*. Vol. 3. No. 2.
- Utomo, Deddy. 2014. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri) Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya Vol.2, No.1, Pp 29- 34.

Skripsi

- Desi Pratiwi. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro*
- Walfajrin. 2018. Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
- Wijayanti, Nur Ike Dita. 2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. *Undergraduate (S1). Universitas Muhammadiyah Malang*.

Undang – Undang

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kemiskinan

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang – undang no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan

Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Internet

Jumlah Penduduk Miskin 2017 – 2021 di Sumatera Utara/ diakses pada tanggal 10 oktober 2022. <https://sumut.bps.go.id>

Kriteria Penerima PKH. 31 maret 2021/ diakses pada tanggal 10 oktober 2022. <https://pkhjepara.com>

PKH adalah Programs Bantuan Sosial dari Pemerintah. 20 juni 2022/ diakses pada tanggal 10 oktober 2022. <https://merdeka.com>

Program Keluarga Harapan. 9 agustus 2019/ diakses pada tanggal 14 oktober 2022. <https://pkh.kemensos.go.id>

Tujuan Organisasi. / Diakses pada 10 januari 2023. <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>



LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Organisasi	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana struktur organisasi PKH di Batu Bara ini? Bagaimana pembentukan sumber daya manusia dan penataannya? Bagaimana kelengkapan dari sarana dan prasarana pendukung? <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana sikap para pendamping PKH di Desa Sei Suka Deras dalam melayani penerima manfaat PKH? <p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana keterampilan sumber daya pelaksana dalam menjalankan tugas? Apakah pelaksana PKH sudah sesuai menjalankan PKH dengan tugas dan perannya?
2	Interpretasi	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut anda mengenai program PKH? Bagaimana ketepatan dari sasaran program PKH? Bagaimana kesesuaian antara pelaksana dengan petunjuk teknis yang ada. <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut anda mengenai program PKH ini? Apakah menurut anda sasaran PKH sudah tepat? <p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut anda mengenai program PKH? Apakah sasaran dalam program PKH ini sudah tepat? Apakah menurut anda pendamping PKH melaksanakan tugas sudah sesuai dengan petunjuk teknis?
3	Penerapan	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang ada pada program PKH? Bagaimana kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan dilapangan? Seperti apa jadwal kegiatan program PKH? Apakah jadwal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang ada pada program PKH? Bagaimana kejelasan jadwal program PKH? <p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang ada pada program PKH? Bagaimana kejelasan jadwal program PKH?

4	Faktor Penghambat	Wawancara dengan Informan Kunci a. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan PKH? Wawancara dengan Informan Utama a. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan PKH? Wawancara dengan Informan Tambahan a. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan PKH?
---	-------------------	---



2. Lampiran Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Muhammad Arif selaku Koordinator PKH Kabupaten Batu Bara



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Hanni Rahma Sari selaku Pendamping PKH di Desa Sei Suka Deras



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Maya Ismiyati selaku Kaur Kesejahteraan di Desa Sei Suka Deras



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Sri Rahayu selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH Komponen Kesehatan



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Delima Simanjuntak selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH Komponen Pendidikan



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Nurmansyah Putra selaku Keluarga Penerima Manfaat Komponen Kesejahteraan Sosial

3. Lampiran Biodata Informan

- **Informan Kunci**

Nama : Mukhrizal Arif, M.Pd.I

Jenis Kelamin : Laki - laki

Usia : 33 Tahun

Pekerjaan : Koordinator PKH

Nama : Hanni Rahma Sari, S.H

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 26 Tahun

Pekerjaan : Pendamping PKH

- **Informan Utama**

Nama : Sri Rahayu

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : Ibu Nurmansyah Putra

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 60 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : Delima Simanjuntak

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

• **Informan Tambahan**

Nama : Maya Ismiyati

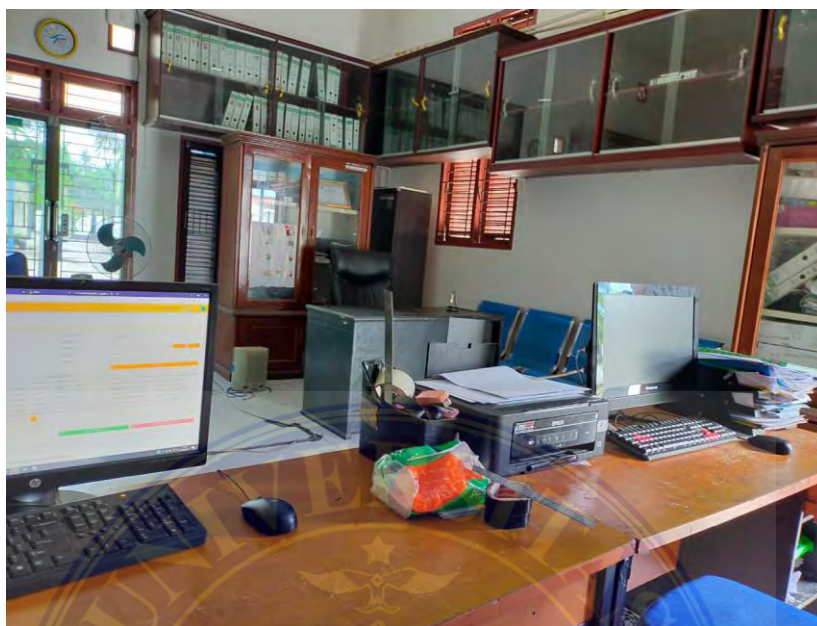
Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 47 Tahun

Pekerjaan : Kaur Kesejahteraan



Lampiran 4. Perlengkapan atau alat-alat kerja



Meja kerja dan alat-alat kerja di kantor UPPKH



Alat Kerja PKH Komponen Kesehatan / Alat Timbang Berat Badan Bayi



Alat Kerja PKH Komponen Kesehatan / Alat Ukur Tinggi Badan Bayi

Lampiran 5. Sarana Pendidikan



Sekolah Dasar Negeri 016513 Sei Suka Deras



Paud / TK UMMI

Lampiran 6. Sarana Tempat Ibadah



Gereja Katolik St Ignasius



Masjid Nurul Ikhlas